

Dampak Makroekonomi pada PENGHIMPUNAN ZIS BAZNAS PUSAT



Siti Nurmu'minah Fitriah
Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah FEM IPB



Dr Alla Asmara
Dosen IE - FEM IPB



Deni Lubis
Dosen Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Faktor yang memengaruhi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah terdiri dari faktor makro dan mikro. Faktor makro adalah kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) serta adanya kebijakan atau peraturan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah. Berdasarkan *Outlook Ekonomi Indonesia BI* (2014), pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari pengaruh inflasi, nilai tukar, jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Berfluktuasinya kinerja makroekonomi akan memengaruhi kegiatan masyarakat dalam mengalokasikan dana sebagai variabel penting penunjang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari besarnya PDB.

Adanya krisis berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik dimana berdasarkan data yang ada, tahun 2008 menjadi titik PDB terendah selama kurun waktu 2008-2014. Namun demikian, PDB pada tahun selanjutnya berangsur mengalami kenaikan seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi domestik dan menunjukkan perkembangan positif. Kenaikan PDB setiap tahunnya merupakan peluang yang besar untuk mengoptimalkan penerimaan zakat pada lembaga pengelola sesuai dengan potensi yang diharapkan.

Penghimpunan dana ZIS di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Pusat mengalami peningkatan pada periode 2008 hingga 2014 dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Penghimpunan dana ZIS di lembaga pengelola zakat dengan optimal dapat dilakukan, salah satunya adalah melalui identifikasi faktor yang memengaruhinya, termasuk variabel makroekonomi. Tujuannya agar lembaga zakat dapat mengoptimalkan fungsinya dalam mengelola dana zakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, sesuai amanat UU No 23/2011.

Data yang ada menunjukkan bahwa penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat, tidak termasuk BAZNAS daerah dan LAZ, mengalami kenaikan selama periode 2008 - 2014. Rata-rata penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat mencapai Rp 44.49 miliar per tahun dengan komposisi rata-rata zakat sebesar 79.20 persen serta infak dan sedekah sebesar 20.80 persen. Penerimaan ZIS tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 82.57 miliar, meningkat 39.88 persen dari sebelumnya Rp 59.03 miliar pada tahun 2013. Sementara penerimaan ZIS terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp 17.49 miliar yang kemudian mengalami kenaikan mencapai dua kali lipat pada tahun 2011 sebesar Rp 42.86 miliar.

Hasil penelitian

Penelitian ini, yang menggunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM), bertujuan untuk menganalisis pengaruh makroekonomi terhadap penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat dengan menggunakan variabel inflasi, uang beredar, IPI, nilai tukar dan BI rate terhadap penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat. Data yang digunakan adalah data *time series* bulanan mulai dari Januari 2008 sampai Desember 2014, yang diperoleh dari BAZNAS Pusat,



Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Hasil estimasinya dapat dilihat pada Tabel 1.

Pada jangka panjang, Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat. Artinya, kenaikan inflasi akan membuat penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat mengalami penurunan. Kenaikan inflasi menunjukkan adanya kenaikan harga-harga barang secara umum, termasuk beras dan emas sebagai penentu besarnya batas nisab zakat.

Hal ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa meningkatnya harga beras dan emas akan meningkatkan besarnya batas nisab yang harus dicapai oleh *muzaki*. Adanya kenaikan inflasi yang tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan menyebabkan kemampuan *muzaki* untuk mencapai batas nisab zakat menurun. Hal ini dapat menyebabkan seseorang yang awalnya masuk kategori sebagai *muzaki*, menjadi orang yang tidak lagi memiliki kewajiban berzakat akibat tidak mencapai batas nisab zakat yang baru. Akibatnya, penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat mengalami penurunan.

Variabel jumlah uang beredar pada jangka panjang berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat. Artinya, adanya kenaikan jumlah uang beredar akan berpengaruh pada kenaikan penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat. Meningkatnya uang beredar akan mendorong pertumbuhan pada sektor riil sehingga akan meningkatkan pendapatan. Adanya kenaikan pendapatan akan membuat kemampuan masyarakat dalam membayar zakat meningkat sehingga penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat mengalami kenaikan.

Variabel IPI memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat. Artinya, adanya kenaikan produksi

Tabel 1 Hasil Estimasi VECM

JANGKA PANJANG		
Variabel	Koefisien	t-statistik
LNLM2(-1)	3.399990*	-5.60381
LNKURS(-1)	-0.052694	0.08267
LNPI(-1)	-4.846489*	2.92970
INFLASI(-1)	-9.216986*	3.08937
BIRATE(-1)	19.23597	-1.78480
JANGKA PENDEK		
Variabel	Koefisien	t-statistik
CointEq1	-1.306045*	-7.16291
D(LNZIS(-1))	0.371052*	2.76069
D(LNM2(-1))	4.970574	-1.36840
D(LNKURS(-1))	-1.340327	0.71301
D(LNPI(-1))	-4.725349*	2.29542
D(INFLASI(-1))	-4.459079	0.47839
D(BIRATE(-1))	34.78550	0.93407

Keterangan: *Signifikan pada taraf nyata 5%

industri akan berdampak pada menurunnya penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat. Penerimaan zakat di BAZNAS Pusat bersumber dari zakat individu dan lembaga, dimana zakat industri merupakan bagian dari zakat lembaga. Berdasarkan data BAZNAS Pusat (2014), jumlah lembaga yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Pusat yang baru mencapai 266 lembaga dengan perkembangan yang fluktuatif tiap tahunnya. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa baru sebagian kecil dari jumlah pelaku industri yang ada di tanah air yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Pusat. Hasil ini bertolak belakang dengan teori yang ada, dimana naiknya IPI seharusnya menaikkan penerimaan ZIS. Boleh jadi, faktor penyebab lainnya adalah kecenderungan perusahaan untuk memiliki LAZ sendiri ketika perusahaan mereka berkembang dan dana ZIS yang dihasilkannya bertambah.

Selain itu, sistem penghimpunan zakat di Indonesia yang masih bersifat sukarela dan belum ada regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk berzakat, juga ikut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kedisiplinan perusahaan dalam menunaikan zakat.

Sehingga, walaupun pertumbuhan produksi industri meningkat, zakat yang terkumpul di BAZNAS Pusat dapat mengalami penurunan.

Edukasi perusahaan

Melihat hubungan IPI yang signifikan dan negatif, dan data menunjukkan IPI mengambil porsi terbesar dalam memengaruhi penerimaan ZIS di BAZNAS Pusat, maka perlu langkah solusi. Pertama, perlunya edukasi tentang kewajiban zakat perusahaan, di samping kewajiban zakat individu, apabila telah memenuhi persyaratan. Kedua, pentingnya memahamkan industri agar mau berzakat melalui lembaga resmi agar lebih sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan UU. Ketiga, sebaiknya kecenderungan untuk mendirikan LAZ sendiri yang dikelola perusahaan diusahakan diminimalkan. Untuk itu, perlu dilakukannya proses penyadaran secara berkelanjutan. Perusahaan lebih baik fokus pada bisnisnya sementara urusan zakat mereka sebaiknya diserahkan pada BAZNAS dan LAZ yang ada. Tentu perusahaan sebagai muzakki dapat mengusulkan program dan wilayah penyaluran zakatnya. *Wallahu a'lam.* ■

TSAQOFI

Growth through Equity



Dr Irfan Syauqi Beik
Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Di tengah perlambatan perekonomian saat ini, jumlah perusahaan besar yang melakukan perampingan dan penghematan dengan cara melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) menjadi semakin bertambah. Jika tidak dilakukan upaya penyelamatan melalui kebijakan nasional yang tepat, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan eksek negatif secara sosial ekonomi. Untuk itu, optimalisasi potensi domestik harus terus menerus dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Instrumen ini sangat cocok dijalankan dalam sebuah perekonomian yang berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Jika melihat sejarah pembangunan negeri ini, maka kita akan menemukan fakta bahwa konsep pembangunan yang selama ini dominan, terutama pada masa Orde Baru, adalah konsep *trickle down effect*. Ini adalah konsep dimana sekelompok kecil masyarakat diberikan keistimewaan (*privilege*) untuk mengembangkan basis-basis produksi yang diharapkan dapat memberikan dampak tetesan ke bawah, yaitu berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan bagi masyarakat umum sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka. Demikian pula di masa pemerintahan Presiden SBY, dimana konsep

economic growth with equity menjadi 'jargon' utama kebijakan ekonomi beliau. Istilah *pro poor* dan *pro growth* menjadi sedemikian populer, terutama bila dikaitkan dengan APBN. Bahkan anggaran pengentasan kemiskinan di masa pemerintahan beliau meningkat dengan tajam. Namun demikian, fakta juga menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan bukan mengalami penurunan, malah yang ada mengalami peningkatan, sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks Gini. Artinya, pembangunan mulai zaman Orde baru hingga hari ini belum dapat menciptakan pemerataan yang berkeadilan.

Tentu saja, agar kesenjangan ini bisa diminimalkan, dan angka kemiskinan bisa direduksi lebih besar lagi, maka keberadaan ZISWAF harus betul-betul dapat dioptimalkan oleh bangsa ini. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla diharapkan dapat memanfaatkan instrumen ZISWAF ini untuk mengurangi sejumlah beban persoalan yang dihadapi bangsa ini, terutama terkait upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Dengan kata lain, keberadaan ZISWAF ini pada dasarnya adalah untuk membantu tugas dan kewajiban pemerintah itu sendiri. Apalagi pondasi sistem dan regulasi ZISWAF ini telah disiapkan oleh pemerintahan sebelumnya, meski masih belum optimal. Berbicara logika ZISWAF, dalam sebuah diskusi bersama ekonom

Fadhil Hasan dan Didin Damanhuri, maka konsep yang dikembangkan dalam Alquran terutama QS 30 : 39, pada dasarnya adalah konsep *economic growth through equity*. Artinya, ekonomi akan tumbuh justru ketika basis atau pondasi pengembangannya adalah instrumen zakat yang berfungsi sebagai alat pemerataan dan *sharing mechanism*. Konsep ini agak sedikit berbeda dengan *economic growth with equity*, dimana ZISWAF tidak menjadi pondasi dari sistem perekonomian yang ada. *Equity* yang dimaksud, dan sebagaimana yang telah dipraktikkan, adalah *government to people transfer* melalui program pengentasan kemiskinan pemerintah.

Adapun logika yang ingin dibangun via konsep *growth through equity* adalah bukan tumbuh dulu baru berbagi, akan tetapi berbagi terlebih dahulu baru akan tumbuh. Logika ini harus tercermin melalui praktik *government to people transfer* sekaligus *people to people transfer*. Dari QS 30 : 39 tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pondasi atau landasan untuk menumbuhkembangkan perekonomian adalah justru dengan semangat berbagi, yang tercermin lewat ibadah ZISWAF yang dilakukan. Hal ini dapat ditinjau dari dua sisi.

Pertama, zakat yang disalurkan kepada mustahik secara konsumtif, akan meningkatkan daya beli mereka. Sehingga, permintaan agregat

akan naik yang kemudian direspon dengan kenaikan dari sisi penawaran agregat. Perekonomian pun akan tumbuh.

Kedua, zakat yang disalurkan dalam bentuk program produktif, akan dapat meningkatkan basis produksi dalam perekonomian sehingga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Bahkan zakat berpotensi untuk menaikkan usaha mikro, mustahik menjadi usaha kecil, dan bahkan menjadi usaha menengah dan besar, sehingga memberikan dampak multiplier yang positif.

Konstruksi paradigma "berbagi sebagai pondasi perekonomian" inilah yang sesungguhnya ingin dibangun oleh Alquran. Sehingga, persepsi yang kemudian muncul adalah persepsi berbagi sebagai pilar pertumbuhan ekonomi. Dampak yang diharapkan adalah munculnya semangat ber-ZISWAF sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat, maupun sebagai pondasi kebijakan perekonomian negara.

ZISWAF tidak akan lagi dianggap sebagai instrumen "pinggiran" dalam kebijakan ekonomi. Yang ada justru ia akan masuk menjadi salah satu komponen *mainstream economic policy* yang dianggap penting oleh negara sehingga eksistensinya tidak akan diabaikan. Dengan demikian diharapkan instrumen ZISWAF ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. *Wallahu a'lam.* ■

Menjaga Pertumbuhan Total Aset BANK SYARIAH DI INDONESIA



Dani Arwan
Mahasiswa S1
Ekonomi Syariah FEM
IPB



Prof Dr Rina Oktaviani
Guru Besar FEM IPB



Salahuddin El Ayyubi
Sekretaris Prodi
Ekonomi Syariah FEM
IPB

Total aset perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2014 total mencapai angka Rp 278.91 triliun, dengan komposisi BUS dan UUS sebanyak Rp 272.34 triliun dan selebihnya ada di BPRS sebanyak Rp 6.57 triliun. Akan tetapi, pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih sangat kecil (4.89 persen). Hal ini diperparah dengan laju pertumbuhan total aset bank syariah yang cenderung menurun dalam dua tahun terakhir, dari 34.21 persen pada Januari 2013 menjadi 12.41 persen akhir tahun 2014 (Statistik Perbankan Syariah 2014).

Perlambatan pertumbuhan total aset bank syariah ini perlu disikapi dengan serius. Perlambatan tersebut membuat upaya untuk mendorong peningkatan *share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional menjadi semakin berat. Hal ini berdampak pada minimnya kontribusi perbankan syariah dalam menjalankan fungsi sebagai *intermediator* kegiatan investasi khususnya pada sektor riil.

Melemahnya pertumbuhan sektor riil berakibat pada melemahnya kegiatan dunia usaha sehingga berpotensi menurunkan pengangguran dan berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia.

Hasil penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan total aset bank syariah (BUS dan UUS) di Indonesia dengan menggunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM). Data yang digunakan adalah data *time series* bulanan periode Januari 2010 hingga Desember 2014.

Hasil estimasi VECM menunjukkan pada jangka pendek, variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan total aset bank syariah. Sedangkan pada jangka panjang variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Equity* (ROE), *Equivalent Rate Pembiayaan* (ERP), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Suku Bunga Kredit (SBK) berpengaruh positif, *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi berpengaruh negatif, sementara variabel *Industrial Production Index* (IPI) tidak berpengaruh signifikan (lihat Tabel 1).

Variabel CAR pada jangka pendek berpengaruh negatif dimana kenaikan CAR sebesar 1 persen akan menurunkan pertumbuhan total aset bank syariah 0.005337 persen. Hasil ini tak sesuai dengan hipotesis awal, karena kenaikan nilai CAR dalam jangka pendek malah menurunkan pertumbuhan total aset bank syariah. Ketidaksiharian ini diduga dikarenakan bahwa CAR yang tinggi akibat meningkatnya modal bank syariah tidak secara langsung meningkatkan kegiatan operasional bank syariah.

Hal ini dikarenakan pada jangka pendek bank syariah masih menghadapi kondisi-kondisi yang tidak pasti sehingga menghambat aktivitas operasional bank. Salah satunya adalah karena belum adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari induk bank syariah di Indonesia.

Variabel selanjutnya yang signifikan pada jangka pendek adalah variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan total



aset bank syariah di Indonesia.

Pada jangka pendek ketika SBIS meningkat 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan total aset bank syariah sebesar 0.033348 persen. Penempatan dana pada instrumen SBIS membuat proporsi dana bank syariah untuk pembiayaan berkurang sehingga berpotensi mengurangi pendapatan bank syariah yang pada akhirnya akan membuat pertumbuhan total aset bank syariah menurun.

Pada jangka panjang, variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan pada jangka panjang terhadap pertumbuhan total aset bank syariah di Indonesia. Pada jangka panjang ketika terjadi kenaikan CAR sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan pertumbuhan total aset bank syariah sebesar 0.048598 persen.

Selanjutnya, variabel ROE pada jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset bank syariah di Indonesia. Ketika terjadi peningkatan ROE sebesar 1 persen maka dalam jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan total aset bank syariah sebesar 0.035961 persen. Meningkatnya nilai ROE menunjukkan adanya peningkatan pada laba bersih atau profitabilitas yang berhasil diperoleh oleh pihak bank syariah.

Variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset bank syariah di Indonesia pada jangka panjang. Ketika terjadi peningkatan nilai NPF sebesar 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan total aset bank syariah sebesar 0.160895 persen, begitupun sebaliknya.

Sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset bank syariah di Indonesia pada jangka panjang. Ketika terjadi kenaikan inflasi sebesar 1 persen maka pada jangka panjang akan menurunkan pertumbuhan total aset bank syariah sebesar 0.024199 persen. Berbeda dengan inflasi, variabel SBIS pada jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset bank syariah di Indonesia.

Pada jangka panjang peningkatan SBIS sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan total aset bank syariah 0.365913 persen. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 63

TABEL 1 HASIL ESTIMASI VECTOR ERROR CORRECTION MODEL		
JANGKA PENDEK		
Variabel	Koefisien	t-statistik
CointEq1	-0.046234	-1.43873
D(LNLT[-1])	0.125128	0.62330
D(CAR[-1])	-0.005337	-2.08129*
D(ROE[-1])	-0.000358	-0.33879
D(NPFF[-1])	-0.004123	-0.31614
D(ERP[-1])	0.000737	0.26412
D(LNLIPI[-1])	0.095865	-1.01949
D(INFLASI[-1])	0.000735	0.13815
D(LNSBIS[-1])	-0.033348	-1.96077*
D(SBK[-1])	-0.024605	-1.05434
C	0.021256	3.83622
JANGKA PANJANG		
LNLT[-1]	1.000000	-
CAR[-1]	0.048598	-5.30198*
ROE[-1]	0.035961	-6.62317*
NPFF[-1]	-0.160895	3.66742*
ERP[-1]	0.025877	-2.02615*
LNLIPI[-1]	1.110444	-1.88358
INFLASI[-1]	-0.024199	2.46788*
LNSBIS[-1]	0.365913	-5.60965*
SBK[-1]	0.234296	-4.00317*
C	-3.984409	-

yang menyebutkan bahwa bank syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil dan menerima imbalan dari Bank Indonesia sesuai akad yang digunakan.

Variabel ERP memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset bank syariah di Indonesia. Pada jangka panjang ketika terjadi kenaikan tingkat bagi hasil pembiayaan pada bank syariah sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan total aset bank syariah sebesar 0.025877 persen. Naiknya tingkat bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah akan mendorong perbankan syariah untuk lebih banyak menempatkan dananya pada pembiayaan bagi hasil. Semakin banyak pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, maka akan membuat bank syariah berpotensi memperoleh pendapatan yang tinggi yang pada akhirnya dalam jangka panjang akan

meningkatkan pertumbuhan total aset bank syariah.

Sedangkan variabel Suku Bunga Kredit (SBK) pada bank konvensional diketahui berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset bank syariah di Indonesia. Pada jangka panjang ketika terjadi kenaikan SBK sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan total aset bank syariah sebesar 0.234296 persen. Meningkatnya suku bunga kredit bank konvensional membuat nasabah merasa keberatan dengan bunga kredit yang harus ditanggung atas sejumlah kredit yang diusulkan, nasabah kemudian akan mencari alternatif lain yaitu dengan beralih ke pembiayaan bank syariah. Hal ini membuat jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah meningkat dan berpotensi menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih besar dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan total aset bank syariah. *Wallahu a'lam.* ■

BUKAN TAFSIR



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



Dr M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Pada dua edisi lalu kami telah membahas bagaimana penyikapannya dua tipikal manusia dalam memandang karunia yang dimaknai tidak hanya aspek materinya yang diimplementasikan dengan rasa syukur atau kufur. Kali ini ulas bagaimana keterkaitannya terhadap pengentasan kemiskinan.

Ajaran agama memandang kemiskinan merupakan masalah struktural karena ketidakpekaan sistem perekonomian pada kaum lemah. Dengan kata lain, kemiskinan sejatinya bukanlah masalah kultural dimana orang miskin bisa serta merta menerima kemiskinan dirinya.

Walaupun hakikatnya setiap makhluk dijamin atas rezekinya masing-masing (QS 29:60), dalam ajaran agama pun ada kewajiban mencari nafkah bagi diri dan keluarganya (misal QS 67:15). Kalaupun tidak dikatakan semuannya, lazimnya kaum miskin pun berusaha namun hasil usahanya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Ajaran agama melarang seseorang untuk berhenti berputus asa, walaupun hasil akhirnya diserahkan kepada Gusti Allah Pemberi Rezeki.

Sumber kemiskinan lumrahnya berasal dari permasalahan struktural yang bisa terjadi karena beberapa hal sebagaimana termaktub juga dalam Kitab Suci. Pertama, kemiskinan bisa jadi karena ada gejala eksternal misalnya peperangan atau bencana alam, sehingga suatu kaum yang tadinya sejahtera bisa dengan seketika menjadi miskin (misal kisah kaum Saba' QS 34:14-15, dan kisah kaum Muhajirin di QS 59:8-9).

Kedua, proses pemiskinan bisa pula secara gradual dimana daya dukung alam terhadap manusia terus berkurang akibat degradasi lingkungan karena kerusakan yang sebagian besar diakibatkan ulah manusia sendiri (QS 30:41 dan QS 42:30).

Ketiga, kemiskinan bisa pula terjadi karena eksploitasi sebagian manusia atas manusia lain, misalnya perbuatan dzalim dengan memakan harta orang lain secara batil (QS 9:34), menjamurnya praktek riba (QS 2:275), dan sebagainya. Kemiskinan kemudian bisa semakin diperparah dengan rendahnya solidaritas golongan kaya sehingga si miskin sulit mampu keluar dari kemiski-

nannya. Si kaya terus mengumpulkan harta benda lalu hanya menyimpannya saja (QS 70:18).

Keempat, kemiskinan timbul akibat konsentrasi kekuasaan, ketimpangan pendidikan, dan sumberdaya ekonomi dimana kekayaan hanya beredar di sekelompok kecil masyarakat saja. Mungkin pelajaran kronisme Fir'aun, Haman, Qarun yang menindas dan memiskinkan rakyat Mesir bisa dijadikan contoh (QS 28:1-88).

Fir'aun adalah representasi dari penguasa yang lalim yang bahkan menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Haman adalah representasi dari aktor intelektual (teknokrat) yang menyokong kesewenang-wenang-an penguasa, sedangkan Qarun adalah representasi dari si kaya tidak peka sosial, kikir, hedonis, gemar bermewah-mewahan, serta membangga-banggakan diri dan kekayaannya.

Benang merahya adalah bahwa ketiga orang ini merepresentasikan kesombong-an dalam bentuknya masing-masing yang sikap angkuhnya kemudian menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran (QS 29: 39).

Ketiganya merupakan pencinta dunia yang lupa akan balasan di hari akhir setelah kematian. Mereka binasa karena membinasakan masyarakat.

Ketiga replika manusia ini sejatinya akan terus berulang dari masa ke masa sampai hari kiamat. Dalam satu komunitas, salah satunya saja bermasalah akan menjadi malapetaka, bagaimana kalau ketiganya saling berkolaborasi melanggengkan dominasi kekuasaan dan kekayaan dengan menghardik pihak lain. Seruan ajaran agama tidak mereka hiraukan bahkan mereka ingin hancurkan. Jangan pun orang miskin yang mereka tinas, Tuhan pun mereka lawan.

Ajaran agama mendorong agar kekayaan dan kekuasaan tidak menumpuk di golongan tertentu dengan pemberdayaan (ekonomi) berbasis dari dan oleh kaum miskin (*pro-poor*) dimana kaum miskin tidak hanya dijadikan objek ekonomi juga dilibatkan dalam aktifitas produktif di sektor riil disertai insentif yang layak dan manusiawi. Aktifitas eksploitatif terhadap kaum kaum lemah (*mustadh'afin*) sangat dicela dalam agama seperti

penerapan riba, eksploitasi buruh, dan sebagainya.

Dari sisi peranan penguasa (pemerintah), keadilan bisa dicapai jika keberpihakan terhadap kaum lemah diutamakan, misalnya dengan anggaran yang *pro-poor*, penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang prima terkait hajat dasar bagi masyarakat miskin, penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih, amanah, dan birokrasi yang tidak korup. Demikian halnya mekanisme (re)distribusi aset dan pendapatan melalui aturan kepemilikan tanah, implementasi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Tuntunan Nabi dalam sebuah hadits menyatakan kesejahteraan dunia akhirat tak dapat dicapai tanpa tegaknya empat pilar: ilmunya para cendekiawan (dalam memperjuangkan keadilan), kedermawanan orang kaya, keadilan pemimpin, dan kesabaran serta doa fakir miskin.

Semoga saja negeri kita diridhoi dan diberkahi Gusti Allah. Selamat Idul Fitri, 'selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin'. ■

Pilar Kesejahteraan